



PERUBAHAN RENJA 2025

Perubahan
Rencana Kerja
Perangkat Daerah
Tahun 2025



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

<http://perindag.babelprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala nikmat, karunia, rahmat dan ridho Nya sehingga dokumen Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P_RENJA_PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 telah dapat disusun dengan baik. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dilaksanakan sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan pada tahun berjalan dan juga merupakan acuan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Demikian rancangan renja perubahan ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh lingkup Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PANGKALPINANG, Juni 2025

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ARMIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19681111 199009 1 001

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 telah disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025. Implementasi Renja Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 telah berlangsung selama 2 (dua) Triwulan.

Dengan kenyataan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan kerangka ekonomi daerah.

Perencanaan yang baik adalah langkah awal mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah ditetapkan, oleh karenanya perlu dilakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 guna menyesuaikan terhadap perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal Daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan untuk melakukan Pemetaan Program Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ke dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disesuaikan berdasar Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 903/0001/BAKUDA tanggal 24 April 2025 Hal Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ serta Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA 2025 dan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta mengakomodir kebijakan Asta Cita dan program, kegiatan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2030.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (P_Renja_OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri F);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 11 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam upaya mendukung program prioritas daerah.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun 2025;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang akan disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025;
- d. Melakukan Perubahan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perubahan Renja, yaitu:
 - i. Perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal Daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.
 - ii. Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ serta Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA 2025.
 - iii. Berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta mengakomodir kebijakan Asta Cita dan program, kegiatan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2030
- e. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024;

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ini didasarkan pada kondisi keuangan

daerah untuk penyesuaian infasing gaji tahun 2024, tambahan kekurangan gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan sesuai edaran pemerintah, serta penyesuaian belanja dengan mematuhi arahan sebagai berikut:

- Menghapus belanja pakaian dinas/pakaian olahraga/pakaian batik tradisional ASN (kecuali penyediaan pakaian untuk KDH/Wakil KDH, DPRD, Paskibraka dan Petugas Haji Daerah).
- Melakukan efisiensi belanja paket meeting (sumber dana PAD) sebesar 50% dan mengalihkan tempat pelaksanaan kegiatan ke ruang rapat milik pemerintah atau dilaksanakan melalui *virtual meeting*.
- Melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 50% untuk seluruh SKPD.
- Melakukan efisiensi belanja alat tulis kantor, cetak honorarium, pemeliharaan Gedung dan pemeliharaan kendaraan sebesar 40%.
- Melakukan efisiensi belanja hibah sebesar 40% kecuali hibah kepada sekolah swasta guna mendukung proses belajar mengajar.
- Melakukan efisiensi belanja modal yang dinilai tidak/belum prioritas sebesar 15%.
- Menggeser gaji PPPK yang semula dianggarkan 9 bulan di gaji dan tunjangan ASN ke belanja barang dan jasa selama 6 bulan (Surat Edaran BKN bahwa penetapan NIP calon PPPK paling lambat pada September 2025).

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat capaian kinerja RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan

RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan perubahan pagu perangkat daerah pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan dan penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025.

B A B II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/ kegiatan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025 Pagu Anggaran Pergeseran_1.

Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rata-rata capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya dapat diolah menjadi rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menghitung rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Perangkat Daerah lain. Tabel 2.1 – 2.2 berikut ini menyajikan capaian kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I 2025 Pagu Anggaran Pergeseran_1.

Tabel 2.1. Capaian Rencana Aksi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	KET
	Tujuan Renstra 2022-2026							
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sasaran Renstra 2022-2026							
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan Trilyun (Rp)	16,750					
	<i>* Revisi target dari pencapaian tahun sebelumnya</i>	<i>capaian tahun 2024 = 22,142</i>	22,300	5,575	5,828	104,54	26,13	
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan Trilyun (Rp)	13,550					
	<i>* Revisi target dari pencapaian tahun sebelumnya</i>	<i>capaian tahun 2024 = 16,515</i>	16,700	4,175	4,265	102,16	25,54	
	Sasaran Program							
	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Ketertiban dalam Penerbitan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Tertib Usaha	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi yang Terkelola Dengan Baik	86,00	15,00	0,00	0,00	0,00	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	KET
	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pengembangan Ekspor Produk Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor	5,00	1,00	1,00	100,00	20,00	
	Mengikatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal yang Digunakan, Dipromosikan dan Dipasarkan Melalui Akses Pasar	70,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	70,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas	90,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku (UPTD. BPSMB)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mengikatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi Produk UMKM yang Dipasarkan (UPTD. RPK)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	KET
	Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Fasilitasi Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM (UPTD. RPK)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SASARAN RPJMD 2025-2029							
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi							
	Urusan Perdagangan							
	TUJUAN RENSTRA 2025-2029							
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SASARAN RENSTRA 2025-2029							
	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
	Meningkatnya tertib usaha, perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Tertib usaha perdagangan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
	Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Laju pertumbuhan ekspor	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	KET
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
	Meningkatnya Indek Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Koberdayaan Konsumen	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku (UPTD. BPSMB)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
	Meningkatnya Promosi dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase produk lokal yang di promosikan dan dipasarkan	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Pelaku Usaha yang menggunakan Layanan Peningkatan Kemasan (UPTD RPK)	Persentase Pelaku Usaha yang menggunakan Layanan Peningkatan Kemasan (UPTD RPK)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urusan Perindustrian							
	TUJUAN RENSTRA 2025-2029							
	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Laju pertumbuhan sektor perdagangan industri	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SASARAN RENSTRA 2025-2029							
	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Fasilitas Layanan Desain dan Produksi Kemasan Produk Pelaku Usaha (UPTD RPK)	Persentase Fasilitas Layanan Desain dan Produksi Kemasan Produk Pelaku Usaha (UPTD RPK)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	KET
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urusan Penunjang							
	TUJUAN RENSTRA 2025-2029							
	Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani	Indeks Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SASARAN RENSTRA 2025-2029							
	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Pelayanan Teknis UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Nilai Kepuasan Pelayanan Teknis UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatkan Pelayanan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan	Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	KET
	Meningkatnya Fasilitas Layanan Desain dan Produksi Kemasan Produk Pelaku Usaha (UPTD RPK)	Persentase Fasilitas Layanan Desain dan Produksi Kemasan Produk Pelaku Usaha (UPTD RPK)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabel 2.2. Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2025 Program/Kegiatan/Subkegiatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAM	PAGU ANGGARAN	TARGET REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)
	DISPERINDAG	22.907.193.713	5.969.091.367	26,058	10,44518707	4.240.556.734	18,51	18.666.636.979
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.307.025.413	5.810.349.267	27,27	18,93	4.135.429.389	19,41	17.171.596.024
1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	71.986.950	15.450.000	21,46	32,73	0	-	71.986.950
1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.999.850	15.450.000	38,63	20,00	0	-	39.999.850
1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.987.100	0	0,00	45,45	0	-	31.987.100
1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	18.450.120.413	4.961.306.030	26,89	36,67	3.601.288.227	19,52	14.848.832.186
1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.439.120.763	4.961.306.030	26,91	29,00	3.601.288.227	19,53	14.837.832.536
1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	0	0,00	50,00	0	-	5.000.000
1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.999.650	0	0,00	31,00	0	-	5.999.650
1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	10.000.000	900.000	9,00	0,00	0	-	10.000.000
1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	900.000	9,00	0,00	0	-	10.000.000
1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	309.938.250	46.490.737	15,00	19,17	58.837.723	18,98	251.100.527
1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.988.100	1.498.215	15,00	25,00	1.483.182	14,85	8.504.918
1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.999.800	5.999.970	15,00	25,00	3.198.243	8,00	36.801.557
1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.972.500	2.995.875	15,00	25,00	2.934.840	14,69	17.037.660
1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.998.000	1.499.700	15,00	0,00	0	-	9.998.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAM	PAGU ANGGARAN	TARGET REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)
1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.850	2.999.977	15,00	25,00	1.838.850	9,19	18.161.000
1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.980.000	2.997.000	15,00	0,00	0	-	19.980.000
1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000	28.500.000	15,00	34,20	49.382.608	25,99	140.617.392
1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	20.909.300	20.909.300	100,00	0,00	0	-	20.909.300
1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.909.300	20.909.300	100,00	0,00	0	-	20.909.300
1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.135.257.000	658.052.400	30,82	25,18	454.956.077	21,31	1.680.300.923
1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.998.000	749.700	15,00	20,00	689.600	13,80	4.308.400
1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.200.000	38.550.000	25,00	25,00	26.671.077	17,30	127.528.923
1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.157.000	577.200	26,76	25,00	425.400	19,72	1.731.600
1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.973.902.000	618.175.500	31,32	30,70	427.170.000	21,64	1.546.732.000
1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	308.813.500	107.240.800	34,73	18,75	20.347.362	6,59	288.466.138
1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.886.500	13.026.500	22,90	25,00	5.170.167	9,09	51.716.333
1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.997.000	43.814.300	24,07	25,00	11.610.920	6,38	170.386.080
1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.930.000	5.400.000	21,66	20,00	3.566.275	14,31	21.363.725

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAM	PAGU ANGGARAN	TARGET REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)
1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000	45.000.000	100,00	5,00	0	-	45.000.000
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	26.989.950	0	0,00	4,00	0	-	26.989.950
1.01	<i>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor</i>	4.995.600	0	0,00	0,00	0	-	4.995.600
1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.995.600	0	0,00	0,00	0	-	4.995.600
1.02	<i>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi</i>	4.999.800	0	0,00	0,00	0	-	4.999.800
1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.999.800	0	0,00	0,00	0	-	4.999.800
1.03	<i>Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar</i>	9.995.750	0	0,00	8,00	0	-	9.995.750
1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	4.999.950	0	0,00	8,00	0	-	4.999.950
1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	4.995.800	0	0,00	8,00	0	-	4.995.800

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAM	PAGU ANGGARAN	TARGET REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)
1.04	<i>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</i>	6.998.800	0	0,00	8,00	0	-	6.998.800
1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	6.998.800	0	0,00	8,00	0	-	6.998.800
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	48.889.600	2.724.000	5,57	2,50	1.814.600	3,71	47.075.000
1.01	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Lelang Komoditas</i>	48.889.600	2.724.000	5,57	2,50	1.814.600	3,71	47.075.000
1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	38.889.800	2.724.000	7,00	3,00	1.814.600	4,67	37.075.200
1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	9.999.800	0	0,00	2,00	0	-	9.999.800
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	108.309.000	0	0,00	19,33	0	-	108.309.000
1.01	<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</i>	21.309.450	0	0,00	25,00	0	-	21.309.450
1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	13.999.700	0	0,00	25,00	0	-	13.999.700
1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	7.309.750	0	0,00	25,00	0	-	7.309.750

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAM	PAGU ANGGARAN	TARGET REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)
1.02	<i>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>	65.999.850	0	0,00	23,00	0	-	65.999.850
1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	7.999.950	0	0,00	25,00	0	-	7.999.950
1.02.0002	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah, Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	57.999.900	0	0,00	21,00	0	-	57.999.900
1.03	<i>Pengawasan Pupuk dan Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</i>	20.999.700	0	0,00	10,00	0	-	20.999.700
1.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	12.999.700	0	0,00	10,00	0	-	12.999.700
1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	8.000.000	0	0,00	10,00	0	-	8.000.000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	26.999.650	0	0,00	7,00	0	-	26.999.650
1.01	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi</i>	26.999.650	0	0,00	7,00	0	-	26.999.650
1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	14.999.900	0	0,00	0,00	0	-	14.999.900
1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	2.999.900	0	0,00	5,00	0	-	2.999.900

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAM	PAGU ANGGARAN	TARGET REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)
1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	8.999.850	0	0,00	16,00	0		8.999.850
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	407.999.350	0	0,00	24,03	0	-	407.999.350
1.01	<i>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota</i>	380.999.800	0	0,00	10,00	0	-	380.999.800
1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	356.000.000	0	0,00	10,00	0	-	356.000.000
1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	4.999.800	0	0,00	0,00	0	-	4.999.800
1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	20.000.000	0	0,00	20,00	0	-	20.000.000
1.03	<i>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</i>	26.999.550	0	0,00	38,05	0	-	26.999.550
1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	21.999.700	0	0,00	76,10	0	-	21.999.700
1.03.0004	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	4.999.850	0	0,00	0,00	0	-	4.999.850
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	55.988.950	0	0,00	1,00	0	-	55.988.950
1.01	<i>Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</i>	27.999.850	0	0,00	3,00	0	-	27.999.850
1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	27.999.850	0	0,00	3,00	0	-	27.999.850

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAM	PAGU ANGGARAN	TARGET REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)
1.02	<i>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	10.999.400	0	0,00	0,00	0	-	10.999.400
1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	10.999.400	0	0,00	0,00	0	-	10.999.400
1.03	<i>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	16.989.700	0	0,00	0,00	0	-	16.989.700
1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10.992.000	0	0,00	0,00	0	-	10.992.000
1.03.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	999.900	0	0,00	0,00	0	-	999.900
1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	4.997.800	0	0,00	0,00	0	-	4.997.800
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	791.999.350	143.371.600	18,10	11,00	103.312.745	13,04	688.686.605
1.01	<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	791.999.350	143.371.600	18,10	11,00	103.312.745	13,04	688.686.605
1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	85.999.700	6.000.000	6,98	3,00	0	-	85.999.700
1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	17.999.750	0	0,00	5,00	0	-	17.999.750
1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	687.999.900	137.371.600	19,97	25,00	103.312.745	15,02	584.687.155
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	95.999.950	7.788.200	8,11	10,00	0	-	95.999.950

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAM	PAGU ANGGARAN	TARGET REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)
1.01	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	95.999.950	7.788.200	8,11	10,00	0	-	95.999.950
1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Provinsi	71.999.950	4.129.000	5,73	10,00	0	-	71.999.950
1.01.0004	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	24.000.000	3.659.200	15,25	10,00	0	-	24.000.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	36.992.500	4.858.300	13,13	6,67	0	-	36.992.500
1.01	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	36.992.500	4.858.300	13,13	6,67	0	-	36.992.500
1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12.997.400	2.159.100	16,61	10,00	0	-	12.997.400
1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	8.998.200	1.727.300	19,20	5,00	0	-	8.998.200
1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan	14.996.900	971.900	6,48	5,00	0	-	14.996.900

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAM	PAGU ANGGARAN	TARGET REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)
	Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas							
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	467.650.075	69.853.110	14,94	7,50	22.557.867	4,82	445.092.208
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	182.704.732	27.405.710	15,00	15,00	22.557.867	12,35	160.146.865
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.782.296	0	0,00	10,00	0	-	43.782.296
1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.391.774	0	0,00	0,00	0	-	8.391.774
1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.997.300	0	0,00	0,00		-	1.997.300
1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.999.850	0	0,00	25,00	0	-	4.999.850
1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.393.372	0	0,00	25,00	0	-	12.393.372
1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	0	0,00	0,00	0	-	16.000.000
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.806.000	0	0,00	0,00	0		15.806.000
1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.806.000	0	0,00	0,00			15.806.000
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.198.000	21.450.000	21,84	25,00	17.467.867	17,79	80.730.133
1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.998.000	0	0,00	25,00	0	-	1.998.000
1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.200.000	21.450.000	22,30	25,00	17.467.867	18,16	78.732.133
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.918.436	5.955.710	23,90	25,00	5.090.000	20,43	19.828.436

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAM	PAGU ANGGARAN	TARGET REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)
1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	16.998.436	2.955.710	17,39	25,00	2.550.000	15,00	14.448.436
1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.920.000	3.000.000	37,88	25,00	2.540.000	32,07	5.380.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	284.945.343	42.447.400	14,90	0,00	0	-	284.945.343
1.02	<i>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah</i>	284.945.343	42.447.400	14,90	0,00	0	-	284.945.343
1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	40.108.000	948.000	2,36	0,00	-	-	40.108.000
1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	134.837.943	32.000.000	23,73	0,00	0	-	134.837.943
1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	93.999.400	9.499.400	10,11	0,00	-	-	93.999.400
1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	16.000.000	0	0,00	0,00	-	-	16.000.000
	UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN	454.903.000	57.822.802	12,71	15,17	49.777.309	10,94	405.125.691
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	52.000.000	0	0,00	9,00	0	-	52.000.000
1.03	<i>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	52.000.000	0	0,00	9,00	0	-	52.000.000
1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	52.000.000	0	0,00	9,00	-	-	52.000.000
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	186.912.400	47.203.602	25,25	16,50	40.027.309	21,42	146.885.091
1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.999.200	0	0,00	0,00	0	-	3.999.200
1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3.999.200	0	0,00	0,00	0	-	3.999.200

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAM	PAGU ANGGARAN	TARGET REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	0	0,00	0,00	0	-	10.000.000
1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	0	0,00	0,00	0	-	10.000.000
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.969.600	0	0,00	0,00	0	-	53.969.600
1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.998.800	0	0,00	0,00	0	-	2.998.800
1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.998.000	0	0,00	0,00	0	-	9.998.000
1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.982.900	0	0,00	0,00	0	-	4.982.900
1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.990.700	0	0,00	0,00			4.990.700
1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.200	0	0,00	0,00	0	-	9.999.200
1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	0	0,00	0,00	0	-	5.000.000
1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000	0	0,00	0,00	0	-	16.000.000
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.000.000	22.000.002	24,72	12,50	20.307.309	22,82	68.692.691
1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0,00	0,00	0	-	1.000.000
1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.000.000	22.000.002	25,00	25,00	20.307.309	23,08	67.692.691
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.943.600	25.203.600	84,17	70,00	19.720.000	65,86	10.223.600
1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	29.943.600	25.203.600	84,17	70,00	19.720.000	65,86	10.223.600
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	215.990.600	10.619.200	4,92	20,00	9.750.000	4,51	206.240.600

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAM	PAGU ANGGARAN	TARGET REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	%	%	(Rp)	%	(Rp)
1.01	<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	215.990.600	10.619.200	4,92	20,00	9.750.000	4,51	206.240.600
1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	215.990.600	10.619.200	4,92	20,00	9.750.000	4,51	206.240.600
	Total Nilai Belanja SKPD	23.829.746.788	6.096.767.279	25,58	33,11	4.312.891.910	18,10	19.516.854.878

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat bahwa dari 36 kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan 2 UPTD (BPSMB dan RPK) baru mencapai 18,51% pada Dinas dan, pada UPTD BPSMB mencapai 4,82% serta pada UPTD RPK mencapai 10,94% sehingga untuk keseluruhan 84 Subkegiatan yang dilaksanakan tersebut realisasi kinerja sampai dengan Triwulan I (sampai Bulan Maret dengan Pagu Awal sebelum Pergeseran/mendahului) baru mencapai 18,10% dari target sampai dengan Triwulan I yang seharusnya mencapai 25,58%.

Pada Triwulan II ini juga sudah dilakukan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ serta Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA 2025, pada APBD Pergeseran-1.

Selain itu untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicapai, guna mewujudkan visi, misi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah RKPD Tahun 2025, dan pemulihan perekonomian.

B A B III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2025

Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Perencanaan penganggaran pada urusan perindustrian dan perdagangan tidak banyak perubahan, hanya melakukan efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas dan mesti dijalankan. Dan menyesuaikan target capaian.

Capaian sasaran Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan indikator nilai lapangan usaha industri pengolahan, target tahun 2024 sebesar 16,750 triliun rupiah, terealisasi 22,142 triliun rupiah. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B274/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu “menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”. Sehingga Target 2025 disesuaikan menjadi 22,300 triliun rupiah. Capaian ini didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yakni program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri, dan program program pengelolaan sistem informasi industri nasional. Untuk sasaran Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan dengan indikator Nilai Lapangan Usaha Perdagangan, target tahun 2024 sebesar 13,550 triliun rupiah, terealisasi 16,515 triliun rupiah. Sehingga target capaian 2025 disesuaikan menjadi 16,700 triliun rupiah. Capaian ini didukung oleh kinerja sebanyak 6 (enam) program, yakni program perizinan dan pendaftaran perusahaan, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pengembangan ekspor, program standardisasi dan perlindungan konsumen, dan program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. (Tersaji dalam table 3.1.)

Tabel 3.1. Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran 2025 dan Perubahan Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET PPERBAHAN 2025	KET
	Tujuan Renstra 2022-2026				
	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	4,50	4,50	
	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	5,50	5,50	
	Sasaran Renstra 2022-2026				
	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan Triliyun (Rp)	16,750	22,300	
	<i>* Revisi target dari pencapaian tahun sebelumnya</i>	<i>capaian tahun 2024 = 22,142</i>			
	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan Triliyun (Rp)	13,550	16,700	
	<i>* Revisi target dari pencapaian tahun sebelumnya</i>	<i>capaian tahun 2024 = 16,515</i>			
	Sasaran Program				
	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)	77,00	77,00	
	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag)	60,00	60,00	
	Meningkatnya Ketertiban dalam Penerbitan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Tertib Usaha	100,00	100,00	
	Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	8,20	8,20	
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	43,00	43,00	
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi yang Terkelola Dengan Baik	86,00	86,00	
	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pengembangan Ekspor Produk Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor	5,00	5,00	
	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal yang Digunakan, Dipromosikan dan Dipasarkan Melalui Akses Pasar	70,00	70,00	
	Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri	2,75	2,75	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET PPERBAHAN 2025	KET
	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	70,00	70,00	
	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	0,00	0,00	
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas	90,00	90,00	
	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	77,00	77,00	
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku (UPTD. BPSMB)	100,00	100,00	
	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan	77,00	77,00	
	Mengikatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Fasilitas Produk UMKM yang Dipasarkan (UPTD. RPK)	50,00	50,00	
	Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Fasilitas Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM (UPTD. RPK)	70,00	70,00	
	SASARAN RPJMD 2025-2029				
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi				
	Urusan Perdagangan				
	TUJUAN RENSTRA 2025-2029				
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	2,00	2,00	
	SASARAN RENSTRA 2025-2029				
	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,20	16,20	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET PPERBAHAN 2025	KET
	Meningkatnya tertib usaha, perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Tertib usaha perdagangan	100,00	100,00	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	86,00	86,00	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
	Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	8,20	8,20	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Laju pertumbuhan ekspor	3,50	3,50	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Koberdayaan Konsumen	44,00	44,00	
	Meningkatnya Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku (UPTD. BPSMB)	100,00	100,00	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
	Meningkatnya Promosi dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase produk lokal yang di promosikan dan dipasarkan	70,00	70,00	
	Meningkatnya Pelaku Usaha yang menggunakan Layanan Peningkatan Kemasan (UPTD RPK)	Persentase Pelaku Usaha yang menggunakan Layanan Peningkatan Kemasan (UPTD RPK)	50,00	50,00	
	Urusan Perindustrian				
	TUJUAN RENSTRA 2025-2029				
	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Laju pertumbuhan sektor perdagangan industri	1,50	1,50	
	SASARAN RENSTRA 2025-2029				
	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	21,20	21,20	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET PPERBAHAN 2025	KET
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	70,00	70,00	
	Meningkatnya Fasilitas Layanan Desain dan Produksi Kemasan Produk Pelaku Usaha (UPTD RPK)	Persentase Fasilitas Layanan Desain dan Produksi Kemasan Produk Pelaku Usaha (UPTD RPK)	70,00	70,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	70,00	70,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	70,00	70,00	
	Urusan Penunjang				
	TUJUAN RENSTRA 2025-2029				
	Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani	Indeks Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan	75,00	75,00	
	SASARAN RENSTRA 2025-2029				
	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75,00	75,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75,00	75,00	
	Meningkatnya Pelayanan Teknis UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Nilai Kepuasan Pelayanan Teknis UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	77,00	77,00	
	Meningkatkan Pelayanan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan	Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan	77,00	77,00	

3.2 Perubahan Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2025

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I, rasionalisasi anggaran Pemerintah Daerah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi selama pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam DPA Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan rasionalisasi yang diharapkan. Perubahan Belanja Langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Penyesuaian pagu anggaran baik itu pengurangan maupun penambahan pagu per kegiatan.

Didasarkan pada kondisi keuangan daerah untuk penyesuaian berdasar Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 903/0001/BAKUDA tanggal 24 April 2025 Hal Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ serta Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA 2025 dan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta penyesuaian belanja dengan mematuhi arahan sebagai berikut:

- menghapus belanja pakaian dinas/pakaian olahraga/pakaian batik tradisional ASN.
- melakukan efisiensi belanja paket meeting (sumber dana PAD) sebesar 50% dan mengalihkan tempat pelaksanaan kegiatan ke ruang rapat milik pemerintah atau dilaksanakan melalui *virtual meeting*.
- melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 50%, Melakukan efisiensi belanja alat tulis kantor, cetak honorarium, pemeliharaan Gedung dan pemeliharaan kendaraan sebesar 40%.
- melakukan efisiensi belanja modal yang dinilai tidak/belum prioritas sebesar 15%. Menggeser gaji PPPK yang semula dianggarkan 9 bulan di gaji dan tunjangan ASN ke belanja barang dan jasa selama 6 bulan (Surat Edaran BKN bahwa penetapan NIP calon PPPK paling lambat pada September 2025).
- serta mengakomodir kebijakan Asta Cita dan program, kegiatan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2030.

Sehingga Pagu awal Dinas dan UPTD sebesar Rp. 23.829.746.788,- dengan rincian:

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp. 22.907.193.713,-
- UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Rp. 467.650.075,-
- UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Rp. 454.903.000,-

Setelah melakukan penyesuaian Pagu Perubahan menjadi Rp 22.872.289.006,-

Atau berkurang sebesar Rp 957.457.782,- dengan rincian pagu perubahan pada:

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 22.031.899.478,-
- UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Rp 426.794.028,-
- UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Rp 413.595.500,-

(tersaji dalam table 3.2.)

Untuk dukungan terhadap Asta Cita, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung Rioritas Nasional No. 5, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

(tersaji dalam table 3.2.1)

Dan untuk Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Mendukung Visi, Misi, dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029. Mendukung Pada Misi No 3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan. Pada Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2029 No. 16. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan, pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

(tersaji dalam table 3.2.2)

Tabel 3.2. Perubahan Belanja Program Kegiatan SubKegiatan APBD Perubahan Tahun 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
	ANGGARAN DINAS DAN UPTD				23.829.746.788	22.872.289.006
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				22.907.193.713	22.031.899.478
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				22.907.193.713	22.031.899.478
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				21.982.201.913	21.362.952.778
3.30.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	21.307.025.413	20.915.625.728
3.30.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	71.986.950	45.863.200
3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	39.999.850	24.776.600
3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	31.987.100	21.086.600
3.30.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				
3.30.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	18.450.120.413	18.311.925.828
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/ Bulan	114 Orang/ Bulan	18.439.120.763	18.302.623.528
3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
3.30.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	4.148.250
3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.999.650	5.154.050
3.30.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	0	0
3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0	0
3.30.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	10.000.000	0
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10.000.000	0
3.30.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	309.938.250	199.762.200
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.988.100	14.982.100
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	39.999.800	23.892.700
3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	19.972.500	24.909.600
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.998.000	9.998.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	19.999.850	11.999.800
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	19.980.000	19.980.000
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	190.000.000	94.000.000
3.30.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	20.909.300	17.954.000
3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	0
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	20.909.300	17.954.000
3.30.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	0
3.30.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.135.257.000	2.139.614.000
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.998.000	4.998.000
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	154.200.000	154.200.000
3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2.157.000	2.157.000
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.973.902.000	1.978.259.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
3.30.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	308.813.500	200.506.500
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	56.886.500	35.212.290
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	181.997.000	115.364.210
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	24.930.000	24.930.000
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	45.000.000	25.000.000
3.30.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	0
3.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	-	26.989.950	11.994.600
3.30.02.1.01.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	-	-	-	4.995.600	0
3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem	1 Dokumen	1 Dokumen	4.995.600	0

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
3.30.02.1.02.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	4.999.800	0
3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.800	0
3.30.02.1.03.	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	-	-	-	9.995.750	4.995.800
3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	2 Dokumen	2 Dokumen	4.999.950	0
3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	2 Laporan	2 Laporan	4.995.800	4.995.800
3.30.02.1.04.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai	-	-	-	6.998.800	6.998.800

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
	Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	12 Dokumen	12 Dokumen	6.998.800	6.998.800
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	-	48.889.600	33.371.900
3.30.03.1.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	-	-	-	48.889.600	33.371.900
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	1 Unit	0	0
3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	30 Laporan	30 Laporan	38.889.800	26.337.900
3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	4 Orang	4 Orang	9.999.800	7.034.000
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	-	108.309.000	75.371.850
3.30.04.1.01.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	21.309.450	12.346.000
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di	4 Laporan	4 Laporan	13.999.700	12.346.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
	Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Tingkat Distributor dan Sub Distributor				
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 laporan	4 laporan	7.309.750	0
3.30.04.1.02.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-	-	65.999.850	50.576.150
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	7.999.950	7.548.350
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	57.999.900	43.027.800
3.30.04.1.03.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-	-	-	20.999.700	12.449.700

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
3.30.04.1.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	12.999.700	4.466.000
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	4 Laporan	8.000.000	7.983.700
3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	-	26.999.650	15.051.800
3.30.05.1.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	-	-	26.999.650	15.051.800
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	14.999.900	8.343.100
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	2.999.900	2.307.000
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	1 Produk	1 Produk	8.999.850	4.401.700
3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	-	407.999.350	270.855.950
3.30.06.1.01.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	380.999.800	254.635.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	1 BPSK	356.000.000	234.563.850
3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	2 LPKSM	2 LPKSM	4.999.800	0
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	43 Pengaduan	43 Pengaduan	20.000.000	20.071.150
3.30.06.1.03.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	26.999.550	16.220.950
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	12 Laporan	21.999.700	16.220.950
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	12 Kasus	12 Kasus	4.999.850	0
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	-	55.988.950	40.680.950
3.30.07.1.01.	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	-	-	27.999.850	21.819.250
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan	14 UMKM	14 UMKM	27.999.850	21.819.250

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
		partisipasi pada pameran produk dalam negeri				
3.30.07.1.02.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	10.999.400	8.434.050
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	14 UMKM	14 UMKM	10.999.400	8.434.050
3.30.07.1.03.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	16.989.700	10.427.650
3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	1 Laporan	10.992.000	8.466.700
3.30.07.1.03.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	14 Orang	14 Orang	999.900	963.150
3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	1 Laporan	1 Laporan	4.997.800	997.800
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				924.991.800	668.946.700
3.31.02.	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	-	791.999.350	592.506.350

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
3.31.02.1.01.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	-	-	791.999.350	592.506.350
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi					
3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	15 Dokumen	15 Dokumen	85.999.700	70.789.900
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8 Dokumen	8 Dokumen	17.999.750	7.216.950
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8 Dokumen	8 Dokumen	0	0
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen	687.999.900	514.499.500
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0
3.31.03.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	-	95.999.950	54.225.500
3.31.03.1.01.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin	-	-	-	95.999.950	54.225.500

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
	Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	71.999.950	40.529.500
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	-	-	-	24.000.000	13.696.000
3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	-	36.992.500	22.214.850
3.31.04.1.01.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-	36.992.500	22.214.850

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	12.997.400	7.902.900
3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	8.998.200	5.944.850
3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	14.996.900	8.367.100
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG				467.650.075	426.794.028
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				467.650.075	426.794.028
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				467.650.075	426.794.028
3.30.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	182.704.732	157.076.285
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
3.30.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	43.782.296	32.862.485
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.391.774	8.391.774
3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.997.300	1.997.300
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.999.850	2.999.850
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.393.372	11.473.561
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	16.000.000	8.000.000
3.30.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	15.806.000	7.903.000
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	15.806.000	7.903.000
3.30.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	98.198.000	98.198.000
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.998.000	1.998.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	96.200.000	96.200.000
3.30.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	24.918.436	18.112.800
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	16.998.436	10.192.800
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	7.920.000	7.920.000
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	-	284.945.343	269.717.743
3.30.06.1.02.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	284.945.343	269.717.743
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	5 Sertifikat	5 Sertifikat	40.108.000	40.108.000
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	250 laporan	250 laporan	134.837.943	134.837.943
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	1 Produk	1 Produk	93.999.400	78.771.800
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	1 Sertifikat	16.000.000	16.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
	UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN				454.903.000	413.595.500
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				454.903.000	413.595.500
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				52.000.000	39.235.100
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	-	52.000.000	39.235.100
3.30.07.1.01.	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	-	-	0	0
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	0 UMKM	0 UMKM	0	0
3.30.07.1.02.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	0	0
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	0 UMKM	0 UMKM	0	0
3.30.07.1.03.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	52.000.000	39.235.100

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	1 Laporan	1 Laporan	52.000.000	39.235.100
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				402.903.000	374.360.400
3.31.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	186.912.400	168.434.100
3.31.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.999.200	2.386.900
3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.999.200	2.386.900
3.31.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	10.000.000	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	10.000.000	0
3.31.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	53.969.600	45.163.600
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.998.800	4.996.200

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.998.000	7.972.600
3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.982.900	4.982.900
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.990.700	4.990.700
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.999.200	7.221.200
3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	5.000.000
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	16.000.000	10.000.000
3.31.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0	0
3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	0
3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0
3.31.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	89.000.000	89.000.000
3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000	1.000.000
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	88.000.000	88.000.000
3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	0	0

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN
3.31.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	29.943.600	31.883.600
3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	29.943.600	31.883.600
3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
3.31.02.	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	-	215.990.600	205.926.300
3.31.02.1.01.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	-	-	215.990.600	205.926.300
3..31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	215.990.600	205.926.300

Tabel 3.2.1. Sinergitas Perangkat Daerah Mendukung Asta Cita (Prioritas Nasional) Tahun 2025

Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Asta Cita	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Perangkat Daerah
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)				
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi				
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas				

No	Asta Cita	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Perangkat Daerah
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	791.999.350	592.506.350	-199.493.000
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	791.999.350	592.506.350	-199.493.000
		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	85.999.700	70.789.900	-15.209.800
		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	17.999.750	7.216.950	-10.782.800
		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	0	0
		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	687.999.900	514.499.500	-173.500.400
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemeberantasan kemiskinan				

No	Asta Cita	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Perangkat Daerah
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan				
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				

Tabel 3.2.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Mendukung Visi, Misi, dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2029 (Prioritas Daerah)	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2029	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah
	Visi: Mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berdaya Saing, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera				
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	1. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, digitalisasi, dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi SMK dengan DUDIKA			
		2. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Kepulauan Bangka Belitung: Perluasan cakupan BPJS, penyediaan obat, penyediaan balai kesehatan santri.			
		3. Penurunan stunting, penggalakan hidup bersih & sehat, serta insentif bagi ibu pasca melahirkan			
		4. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan pembangunan kepemudaan			
		5. Penguatan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas			
		6. Pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan penguatan sosial masyarakat			
		7. Penguatan dan pemeliharaan hubungan sosial yang kondusif			
		8. Menjamin kerukunan antar umat beragama dan kebebasan beribadah			

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2029 (Prioritas Daerah)	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2029	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah
		9. Penciptaan kesempatan kerja di sektor formal			
		10. Penguatan dan peningkatan produktivitas UKM & koperasi			
		11. Pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan			
2	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	12. Reformasi politik, hukum dan birokrasi			
		13. Pencegahan dan pemberantasan korupsi			
		14. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui e-Government			
3	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	15. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan			
		16. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	592.506.350	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	592.506.350	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	70.789.900	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	7.216.950	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2029 (Prioritas Daerah)	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2029	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah
			Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	514.499.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		17. Mencapai swasembada pangan, energi dan air			
		18. Pengembangan pariwisata yang berkualitas			
		19. Membangun iklim investasi yang kondusif, cepat dan terbuka dalam mendorong kemajuan dan pengembangan potensi daerah			
		20. Mengembangkan ekosistem inovasi, riset dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah			
		21. Penataan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup			

Tabel 3.3. Kerangka Pendanaan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2025

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024	KETERANGAN
1	2	3	4
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI	22.846.432.006,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	18.302.623.528,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.543.808.478,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	
5.2	BELANJA MODAL	25.857.000,00	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.857.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0	Khusus Bakuda
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		
5.4	BELANJA TRANSFER	0	Khusus Bakuda
5.4.01	Belanja Bagi Hasil		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		
	Jumlah Belanja	22.872.289.006,00	

Tabel 3.4. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU		
		RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
	Urusan Pilihan												
	PERDAGANGAN	10	10	10	27	27	24	63	63	56	22.501.851.988	22.501.851.988	21.828.981.906
	PERINDUSTRIAN	5	5	5	9	9	8	21	21	19	1.327.894.800	1.327.894.800	1.043.307.100
		15	15	15	36	36	32	84	84	75	23.829.746.788	23.829.746.788	22.872.289.006

B A B IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan PD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Usulan perubahan Anggaran pada APBD 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada APBD 2025 sebesar Rp 23.829.746.788,- diusulkan menjadi Rp 22.872.289.006,- penyesuaian anggaran ini di dasarkan hasil efisiensi Tindaklanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ serta Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA 2025 dengan pengurangan Rp 957.457.782,-

Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Lampiran RENJA 2025 – SIPD

- ✓ Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Rencana Kerja Perubahan Provinsi Bangka Belitung
- ✓ Draf SK Tim Perubahan Renja 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							19.559.857.977,00	22.907.193.713,00	22.031.899.478,00	2.472.041.501,00							33.507.436.752,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							18.304.857.977,00	21.982.201.913,00	21.362.952.778,00	3.058.094.801,00							26.197.436.752,00		
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-						17.386.857.977,00	21.307.025.413,00	20.915.625.728,00	4.596.478.775,00							21.983.336.752,00		
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						90.000.000,00	71.986.950,00	45.863.200,00	-44.136.800,00							320.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11 Dokumen	11 Dokumen	50.000.000,00	39.999.850,00	24.776.600,00	-25.223.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan		240.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7 Laporan	7 Laporan	40.000.000,00	31.987.100,00	21.086.600,00	-18.913.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						14.561.857.977,00	18.450.120.413,00	18.311.925.828,00	3.750.067.851,00							17.857.206.752,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						114 Orang/ Bulan	114 Orang/ Bulan	14.546.857.977,00	18.439.120.763,00	18.302.623.528,00	3.755.765.551,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan		17.822.206.752,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.148.250,00	-851.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	5.999.650,00	5.154.050,00	-4.845.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-						10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00							0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-						20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00							150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						10 Orang	0 Orang	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						322.183.500,00	309.938.250,00	199.762.200,00	-122.421.300,00							1.016.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.988.100,00	14.982.100,00	4.982.100,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan		18.150.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	39.999.800,00	23.892.700,00	-16.107.300,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan		90.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	19.972.500,00	24.909.600,00	4.909.600,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			24.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.998.000,00	9.998.000,00	-2.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			12.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	19.999.850,00	11.999.800,00	-8.000.200,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			60.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.06.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	-20.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			60.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	202.183.500,00	190.000.000,00	94.000.000,00	-108.183.500,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	20.909.300,00	17.954.000,00	-32.046.000,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8 Unit	50.000.000,00	20.909.300,00	17.954.000,00	-32.046.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.019.000.000,00	2.135.257.000,00	2.139.614.000,00	120.614.000,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		2.273.150.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00	-2.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			12.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	154.200.000,00	154.200.000,00	29.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			181.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	2.157.000,00	2.157.000,00	-1.843.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			6.050.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.885.000.000,00	1.973.902.000,00	1.978.259.000,00	93.259.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			2.073.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	313.816.500,00	308.813.500,00	200.506.500,00	-113.310.000,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		366.780.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	56.886.500,00	56.886.500,00	35.212.290,00	-21.674.210,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			45.980.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	11 Unit	182.000.000,00	181.997.000,00	115.364.210,00	-66.635.790,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			96.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	37 Unit	24.930.000,00	24.930.000,00	24.930.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			24.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-				-	-	33.000.000,00	26.989.950,00	11.994.600,00	33.000.000,00							66.000.000,00		
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor																			
	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	4.995.600,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi																			
	3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	4.999.800,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar																			
	3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya																			
			Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission				2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	4.999.950,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	4.995.800,00	4.995.800,00	-4.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)																			
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																			
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00	6.998.800,00	6.998.800,00	-6.001.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			26.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-				-	-	140.000.000,00	48.889.600,00	33.371.900,00	595.000.000,00							735.000.000,00		
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas																			
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi</i>				1 Unit	0 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi</i>				30 Laporan	30 Laporan	30.000.000,00	38.889.800,00	26.337.900,00	-3.662.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			170.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas																		
			<i>Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi</i>				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	9.999.800,00	7.034.000,00	-12.966.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	-				-	-	130.000.000,00	108.309.000,00	75.371.850,00	-130.000.000,00							0,00	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	25.000.000,00	21.309.450,00	12.346.000,00	-12.654.000,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	13.999.700,00	12.346.000,00	-7.654.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>				4 laporan	0 laporan	5.000.000,00	7.309.750,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-				-	-	90.000.000,00	65.999.850,00	50.576.150,00	-39.423.850,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	7.999.950,00	7.548.350,00	-2.451.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>				4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	57.999.900,00	43.027.800,00	-36.972.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-				-	-	15.000.000,00	20.999.700,00	12.449.700,00	-2.550.300,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi																		
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi</i>				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	12.999.700,00	4.466.000,00	-534.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi																		
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	8.000.000,00	7.983.700,00	-2.016.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-				-	-	45.000.000,00	26.999.650,00	15.051.800,00	1.648.100.000,00							1.693.100.000,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-				-	-	45.000.000,00	26.999.650,00	15.051.800,00	-29.948.200,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			1.693.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	15.000.000,00	14.999.900,00	8.343.100,00	-6.656.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			834.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	15.000.000,00	2.999.900,00	2.307.000,00	-12.693.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			526.350.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor																			
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				1 Produk	1 Produk	15.000.000,00	8.999.850,00	4.401.700,00	-10.598.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			332.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-				-	-	500.000.000,00	407.999.350,00	270.855.950,00	-430.000.000,00							70.000.000,00		
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	465.000.000,00	380.999.800,00	254.635.000,00	-210.365.000,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen																			
			Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				1 BPSK	1 BPSK	440.000.000,00	356.000.000,00	234.563.850,00	-205.436.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen																			
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				2 LPKSM	2 LPKSM	5.000.000,00	4.999.800,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Ketekok Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen																			
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				43 Pengaduan	43 Pengaduan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.071.150,00	71.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	26.999.550,00	16.220.950,00	-18.779.050,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	21.999.700,00	16.220.950,00	-13.779.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																			
			Jumlah Kasus yang Ditangani				12 Kasus	0 Kasus	5.000.000,00	4.999.850,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-				-	-	70.000.000,00	55.988.950,00	40.680.950,00	1.580.000.000,00							1.650.000.000,00		
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-				-	-	30.000.000,00	27.999.850,00	21.819.250,00	-8.180.750,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																			
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				14 UMKM	6 UMKM	30.000.000,00	27.999.850,00	21.819.250,00	-8.180.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	15.000.000,00	10.999.400,00	8.434.050,00	-6.565.950,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																			
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				14 UMKM	8 UMKM	15.000.000,00	10.999.400,00	8.434.050,00	-6.565.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	25.000.000,00	16.989.700,00	10.427.650,00	-14.572.350,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																			
			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	10.992.000,00	8.466.700,00	-6.533.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.07.1.03.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				14 Orang	1 Orang	5.000.000,00	999.900,00	963.150,00	-4.036.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.997.800,00	997.800,00	-4.002.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.255.000.000,00	924.991.800,00	668.946.700,00	-586.053.300,00							7.310.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-				-	-	1.070.000.000,00	791.999.350,00	592.506.350,00	3.955.000.000,00							5.025.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-				-	-	1.070.000.000,00	791.999.350,00	592.506.350,00	-477.493.650,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			5.025.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				15 Dokumen	15 Dokumen	30.000.000,00	85.999.700,00	70.789.900,00	40.789.900,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00	17.999.750,00	7.216.950,00	-22.783.050,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	1.000.000.000,00	687.999.900,00	514.499.500,00	-485.500.500,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			2.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-				-	-	140.000.000,00	95.999.950,00	54.225.500,00	1.480.000.000,00							1.620.000.000,00	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-				-	-	140.000.000,00	95.999.950,00	54.225.500,00	-85.774.500,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		1.620.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	71.999.950,00	40.529.500,00	-49.470.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			1.350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				-	-	50.000.000,00	24.000.000,00	13.696.000,00	-36.304.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			270.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-				-	-	45.000.000,00	36.992.500,00	22.214.850,00	620.000.000,00							665.000.000,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-				-	-	45.000.000,00	36.992.500,00	22.214.850,00	-22.785.150,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		665.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	12.997.400,00	7.902.900,00	-7.097.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	8.998.200,00	5.944.850,00	-9.055.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			270.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SII/Nas				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.996.900,00	8.367.100,00	-6.632.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			195.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG									496.000.000,00	467.650.075,00	426.794.028,00	-69.205.972,00							471.000.000,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							496.000.000,00	467.650.075,00	426.794.028,00	-69.205.972,00							471.000.000,00	
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							496.000.000,00	467.650.075,00	426.794.028,00	-69.205.972,00							471.000.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	187.000.000,00	182.704.732,00	157.076.285,00	9.000.000,00							196.000.000,00	
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	47.800.000,00	43.782.296,00	32.862.485,00	-14.937.515,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			53.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.400.000,00	8.391.774,00	8.391.774,00	-8.226,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			8.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.997.300,00	1.997.300,00	-2.700,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.999.850,00	2.999.850,00	-2.000.150,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.400.000,00	12.393.372,00	11.473.561,00	-926.439,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			16.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.000.000,00	15.806.000,00	7.903.000,00	-8.097.000,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			16.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	16.000.000,00	15.806.000,00	7.903.000,00	-8.097.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			16.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	98.200.000,00	98.198.000,00	98.198.000,00	-2.000,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			98.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	-2.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96.200.000,00	96.200.000,00	96.200.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			96.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	25.000.000,00	24.918.436,00	18.112.800,00	-6.887.200,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			28.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	17.000.000,00	16.998.436,00	10.192.800,00	-6.807.200,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	8.000.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	-80.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			8.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-				-	-	309.000.000,00	284.945.343,00	269.717.743,00	-34.000.000,00							275.000.000,00	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	309.000.000,00	284.945.343,00	269.717.743,00	-39.282.257,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				5 Sertifikat	5 Sertifikat	5.000.000,00	40.108.000,00	40.108.000,00	35.108.000,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				250 laporan	250 laporan	174.000.000,00	134.837.943,00	134.837.943,00	-39.162.057,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau				1 Produk	1 Produk	110.000.000,00	93.999.400,00	78.771.800,00	-31.228.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan				1 Sertifikat	1 Sertifikat	20.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN							491.000.000,00	454.903.000,00	413.595.500,00	-77.404.500,00							5.748.956.400,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							491.000.000,00	454.903.000,00	413.595.500,00	-77.404.500,00							5.748.956.400,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							70.000.000,00	52.000.000,00	39.235.100,00	-30.764.900,00							718.000.000,00	
1.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-				-	-	70.000.000,00	52.000.000,00	39.235.100,00	648.000.000,00							718.000.000,00	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			303.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				0 UMKM	0 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			303.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				0 UMKM	0 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	70.000.000,00	52.000.000,00	39.235.100,00	-30.764.900,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	52.000.000,00	39.235.100,00	-30.764.900,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							421.000.000,00	402.903.000,00	374.360.400,00	-46.639.600,00							5.030.956.400,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	201.000.000,00	186.912.400,00	168.434.100,00	829.956.400,00							1.030.956.400,00	
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.000.000,00	3.999.200,00	2.386.900,00	-1.613.100,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			75.867.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	3.999.200,00	2.386.900,00	-1.613.100,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			75.867.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		85.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	0 Orang	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			85.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	58.000.000,00	53.969.600,00	45.163.600,00	-12.836.400,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		527.360.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	2.998.800,00	4.996.200,00	1.996.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			5.190.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.998.000,00	7.972.600,00	-2.027.400,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			38.066.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	4.982.900,00	4.982.900,00	-17.100,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			13.842.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	4.990.700,00	4.990.700,00	-9.300,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			10.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.999.200,00	7.221.200,00	-2.778.800,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			22.493.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			10.381.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			426.984.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		176.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Rangku, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			156.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	89.000.000,00	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		155.979.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			5.324.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			144.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			6.655.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	30.000.000,00	29.943.600,00	31.883.600,00	1.883.600,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	29.943.600,00	31.883.600,00	1.883.600,00	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-				-	-	220.000.000,00	215.990.600,00	205.926.300,00	3.780.000.000,00							4.000.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-				-	-	220.000.000,00	215.990.600,00	205.926.300,00	-14.073.700,00			-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan	-		4.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000,00	215.990.600,00	205.926.300,00	-14.073.700,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan			4.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
J U M L A H									19.559.857.977,00	22.907.193.713,00	22.031.899.478,00	2.472.041.501,00							33.507.436.752,00	



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ /DISPERINDAG/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu membentuk Tim Penyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. bahwa tim yang disebutkan namanya dalam Keputusan Gubernur ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri F);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 11 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab bertugas bertanggungjawab secara umum terhadap proses penyusunan dan substansi dokumen Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025;
- b. Ketua bertugas melakukan koordinasi, mengarahkan serta memberikan petunjuk dan pembinaan kepada anggota dalam melakukan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 serta menyampaikan laporan penyusunan Renja Perubahan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- c. Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam mengoordinir proses penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025;
- d. Anggota bertugas memberikan masukan secara substantif kepada Ketua melalui Sekretaris terkait dengan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun narasi Bab I Pendahuluan, sebagai berikut:
 - a. Latar Belakang, pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
 - b. Landasan Hukum, Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;
 - c. Maksud dan Tujuan; Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - d. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - e. Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
 - 2) Menyusun Bab II, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, sebagai berikut:
 - a. Melakukan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I;
 - b. Melakukan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - 3) Menyusun narasi Bab III, Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah dan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah, sebagai berikut:
 - a. Melakukan telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
 - b. Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
 - c. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

- d. Melakukan rekapitulasi program dan kegiatan dan memetakan sesuai dengan pendanaan;
 - e. Melakukan verifikasi program dan kegiatan sesuai dengan RKPD;
 - f. Menuangkan dalam narasi dan table sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017.
- 4) Menyusun narasi Bab V, Penutup, sebagai berikut: menyusun catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Melakukan harmonisasi dan penyelarasan terhadap materi dan penyajian dokumen Renja Tahun 2023 sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;
 - 6) Berperan aktif dalam pelaksanaan Rapat Tim dan Forum Renja, serta pembahasan yang terkait dengan penyusunan dokumen Renja Perubahan Tahun 2024;
 - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris;
 - 8) Menyampaikan Rancangan Awal Renja Perubahan, Rancangan, dan Rancangan Akhir Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 kepada Ketua Tim Koordinasi melalui Sekretaris.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Mei 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

HIDAYAT ARSANI

Tembusan disampaikan KepadaYth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :188.44/ /DISPERINDAG/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- III. Sekretaris : Perencana Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
2. Kepala Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri;
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Fasilitas Usaha Industri;
5. Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
6. Kepala UPTD Rumah Promosi dan Kemasan;
7. Kasubbag Umum;
8. Kasubbag Tata Usaha UPTD BPSMB;
9. Kasubbag Tata Usaha UPTD RPK;
10. Sub Koordinator/ Kasi di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
11. Ria Agiesti (Penata Laporan Keuangan)
12. Purnamajaya, S.E (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Disperindag);
13. Ramayani, S.M (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Disperindag).

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

HIDAYAT ARSANI



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 – 439 093

Web : <http://perindag.babelprov.go.id>

Fax : 0717 – 439 093

email : perindag@babelprov.go.id